

# KONVERSI HAK ATAS TANAH GANGGAM BAUNTUAK MENURUT UUPA DI SUMATERA BARAT

## *Conversion of Ganggam Bauntuak Land Right under The Agrarian Law in West Sumatera*

Kurnia Warman<sup>1</sup> dan Maria S.W. Sumardjono<sup>2</sup>

*Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

### ABSTRACT

One of the *adat* rights whose conversion is categorically affirmed by the Agrarian Law (UUPA) is the right over *ganggam bauntuak* land found in the Province of West Sumatra. *Ganggam bauntuak* is a term used for the distribution of the utilization of communal land (*kaum* land) among the community members. In spite of the affirmation in the UUPA that the *adat* right has to be converted into the right of use, in practice there exists a deviation in its implementation. In order to speed up the process of land registration, the regional authorities in West Sumatra convert *ganggam bauntuak* land right into the right of ownership, not the right of use. In view of the fact above, this research aims to find out about the mechanism for converting *ganggam bauntuak* land right, some causes of the deviation from the proper procedure, and the community's views on the implementation of conversion in terms of kinds of right, the scope of right as well as the obligations of the land right holders resulting from the implementation of conversion.

This research conducted in the Province of West Sumatra, where *ganggam bauntuak* exists. Primary data were needed to answer the research question and were obtained through questionnaires given to 40 respondents (*mamak kepala waris*) who spread out in four *nagari* and selected through a simple random sampling from four subdistricts within two *DAT II* (regency/municipality) as a research location. In addition, 11 resource persons were interviewed to support the qualitative analysis of the collected data, whereas secondary data were obtained through a documentary study.

Results of the research shows that first, the mechanism for implementing of the conversion of *ganggam bauntuak* land right is carried out in accordance with Regulation of the Ministry of Agriculture and Agrarian Affairs (PMPA) No 2 of 1962. This mechanism does not stand on its own but is integrated into the communal land (*kaum* land), which is converted into right of ownership. Second, the major contributing factor to cases of deviation in

1. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

which *ganggam bauntuak* land right is converted into right of ownership is the existence and nature of *ganggam bauntuak* right itself, which is an *adat* right of ownership and not only a right of use in spite of its communal character. Third, the kind of right that is appropriate for *ganggam bauntuak* land, as perceived by the community, is the right of ownership, not the right of use; this right covers particularly land for housing development, but it can also include agricultural land; the obligation of *ganggam bauntuak* land-holders when exercising their right to put in a request for conversion is generally payment of cost incurred in writing of a title-deed.

**Keywords:** *Conversion of Right - Ganggam Bauntuak Land*

## PENGANTAR

Cita-cita untuk mengadakan kesatuan hukum tanah nasional mulai terwujud sejak lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960. Sejak saat itu pulalah tercipta unifikasi hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia.

Sebagai dasar unifikasi hukum pertanahan, UUPA mempunyai tujuan pokok ialah: (a) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; (b) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; (c) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pokok itu, UUPA dengan tegas mengadakan penghapusan terhadap dualisme hukum pertanahan yang berlaku sebelumnya. Hukum tanah nasional harus dijauhkan dari dampak buruk kedua sistem hukum yang berlaku pada masa lampau itu. Hukum Barat dipengaruhi dan didasarkan pada konsep kolonialisme serta pemerasan, sedangkan hukum adat pun ada yang dipengaruhi oleh feodalisme yang justru merugikan rakyat. Oleh karena itu Boedi Harsono (1994: 142) menegaskan, bahwa hukum adat yang dijadikan dasar hukum agraria tersebut masih harus dibersihkan dari cacatnya yang tidak asli dan kemudian disempurnakan sehingga sesuai dengan tuntutan zaman.

Dicantumkannya Ketentuan Konversi pada diktum kedua UUPA merupakan langkah awal dari realisasi penghapusan terhadap dualisme tersebut. Konversi hak atas tanah adalah perubahan atau penyesuaian hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA dengan hak-hak

atas tanah yang diatur dalam UUPA, baik tanah hak barat maupun hak adat. Hal ini dimaksudkan agar terdapatnya kesatuan dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah di seluruh Indonesia.

Salah satu hak adat atas tanah yang ditegaskan konversinya oleh UUPA adalah hak *ganggam bauntuik*, yang di Sumatera Barat sebagai daerah asal istilah hak ini dikenal dengan *ganggam bauntuak* (Pasal VI Ketentuan Konversi UUPA). Menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 6 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas Tanah, bahwa hak-hak yang disebut dalam Pasal VI Ketentuan Konversi UUPA itu ditegaskan dan didaftarkan menjadi hak pakai. Untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam pemilikan tanah sesuai dengan perkembangan zaman, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti PP No. 10 Tahun 1961. Rujukan baru dalam kegiatan pendaftaran tanah ini dijabarkan lebih rinci oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMA/KBPN) No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tanah *ganggam bauntuak* merupakan bagian dari tanah milik *kaum* (milik komunal) yang atas kesepakatan seluruh anggota *kaum* diperuntukkan kepada keluarga-keluarga sesuku (*jurai/paruik*) secara matrilineal baik untuk tempat tinggal maupun untuk pertanian.

Benda-Beckmann (1979: 155-156) menyatakan:

*The ganggam bauntuak gives its recipients the exclusive right to use and to exploit the property and to consume its products. It is, in principle, given in continuity to the woman and her jurai... The ganggam bauntuak is distributed to the woman and their jurai in continuity..*

Konsisten dengan sistem matrilinealnya, tanah *ganggam bauntuak* hanya diperuntukkan kepada perempuan dan/atau *jurai*, laki-laki tidak berhak atas tanah *ganggam bauntuak*. *Ninik mamak* (kelompok paman dalam arti khusus atau *mamak* yang merupakan pemuka-pemuka adat), termasuk *mamak kepala waris* (MKW) dan laki-laki lainnya hanya bertugas mengawasi atau mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah itu demi kelangsungan hidup saudara-saudara perempuan dan kemenakannya.

Tanah milik *kaum* adalah tanah milik adat bercorak komunal yang terdapat di Sumatera Barat yang dimiliki oleh suatu *kaum* di bawah pimpinan seorang *mamak kepala waris* (MKW). Dalam banyak tulisan, tanah milik *kaum* sering disebut *ulayat kaum* ("tanah pusaka tinggi"), padahal secara teknis yuridis hak tersebut tidaklah termasuk hak *ulayat* tetapi hak milik adat yang masih bersifat komunal. *Kaum* merupakan

suatu kelompok orang (keluarga) sesuku, berasal dari nenek yang sama, mempunyai sebidang atau beberapa bidang tanah yang dimiliki secara komunal di bawah pimpinan *mamak kepala waris* (MKW). *Mamak kepala waris* (MKW) ialah laki-laki tertua –tidak selalu– dalam suatu *kaum* yang berwenang mengatur peruntukan dan yang menentukan kebijaksanaan terhadap tanah milik *kaum*.

Dalam pelaksanaannya terlihat bahwa konversi hak atas tanah *ganggam bauntuak* bukanlah menjadi hak pakai, melainkan menjadi hak milik. Kenyataan ini terlihat juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (1989) dan secara eksplisit dalam penelitian Sjamsir Dt. Perpatih (1985). Kedua penelitian ini menunjukkan, bahwa tidak pernah tanah *ganggam bauntuak* dikonversi menjadi hak pakai tetapi menjadi hak milik. Hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan Konversi UUPA, padahal yang ingin diwujudkan adalah kesatuan hukum dalam bidang pertanahan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks yang sama, Boedi Harsono (1994: 167-168) juga menyatakan, kecenderungan menipisnya hak komunal tampak pada perkembangan tanah-tanah *kaum* di Minangkabau, yang dimintakan pendaftaran sebagai tanah milik bersama. Setelah didaftarkan sebagai milik bersama, maka diadakan pemecahan menjadi tanah-tanah hak milik para anggota *kaum* masing-masing. Padahal hak penguasaan oleh para anggota *kaum* menurut hukum adat bukan hak milik, melainkan *ganggam bauntuak* yang dalam hukum tanah nasional dikonversi menjadi hak pakai.

Berdasarkan gambaran di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut. (1) Bagaimanakah mekanisme konversi hak atas tanah *ganggam bauntuak* menurut UUPA di Sumatera Barat? (2) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan konversi hak atas tanah *ganggam bauntuak* dari Ketentuan Konversi UUPA yang seharusnya menjadi hak pakai, tetapi menjadi hak milik? (3) Bagaimanakah pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan konversi hak *ganggam bauntuak* (yang meliputi antara lain, jenis hak yang paling sesuai sebagai konversinya, luas cakupan haknya, hak dan kewajiban dari pemegang hak), agar pelaksanaan konversi dapat berjalan lancar dan kesatuan masyarakat tetap terjaga dengan baik?

## CARA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara obyektif tentang konversi hak

atas tanah *ganggam bauntuak* menurut UUPA di Sumatera Barat. Data penelitian terdiri dari, baik data primer maupun data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang ditujukan kepada para responden dan dari narasumber yang dihimpun melalui wawancara bebas, sedangkan data sekunder didapatkan dengan menggunakan studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif untuk menjawab permasalahannya secara deskriptif (Sumardjono, 1996: 39). Lokasi penelitian meliputi 2 daerah tingkat (Dati) II di Sumatera Barat, yaitu Kotamadia (Kodia) Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Responden terdiri atas 40 orang *mamak kepala waris* (MKW), sebagai penguasa tanah milik *kaum*, tempat terdapatnya tanah *ganggam bauntuak*. Jumlah tersebut didapatkan dari masing-masing 10 orang pada 4 *nagari* sampel. Narasumber penelitian terdiri atas 11 orang, yakni pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan konversi hak atas tanah di Sumatera Barat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Konversi Hak atas Tanah Ganggam Bauntuak menurut UUPA

Menurut pihak BPN di Sumatera Barat, keberadaan tanah *ganggam bauntuak* tidak terlalu dipermasalahan dan tidak perlu dibesar-besarkan dalam pelaksanaan konversi hak-hak adat, karena tanah *ganggam bauntuak* itu tidak teridentifikasi dengan jelas. Patokan dasar dalam pelaksanaan konversinya adalah tanah milik *kaum* yang dianggap sebagai tanah milik adat yang bercorak komunal dan dalam pelaksanaannya mengacu kepada Pasal 56 dan Pasal II Ketentuan Konversi UUPA, bukan Pasal VI Ketentuan Konversi UUPA. Jadi, karena tanah *ganggam bauntuak* merupakan bagian-bagian dari tanah milik *kaum* maka keberadaannya juga dianggap sebagai tanah milik *kaum*. Dengan perkataan lain, baik tanah milik *kaum* maupun tanah *ganggam bauntuak*, keduanya merupakan tanah milik adat sebagai hak komunal (dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 16 (1990: 63) dinyatakan, bahwa hak milik adat terdiri atas dua jenis yaitu hak perorangan dan hak komunal). Tanah milik *kaum* dan tanah *ganggam bauntuak* sama-sama merupakan hak komunal, bukan hak perorangan.

Oleh karena itu, bahasan tentang mekanisme konversi atas tanah *ganggam bauntuak* tidaklah berdiri sendiri melainkan menyatu dalam mekanisme konversi tanah milik *kaum*. Secara umum mekanisme pelaksanaan konversi dan pendaftaran tanah milik *kaum*, termasuk dalamnya tanah *ganggam bauntuak*, dapat dibedakan dalam dua

tingkatan kegiatan. *Pertama*, kegiatan di tingkat adat, yang bertujuan untuk melepaskan tanah milik adat tersebut dari kungkungan adat yang dipegang oleh *mamak kepala waris* (MKW). Kegiatan ini sangat dominan dalam proses pembuatan surat pernyataan pemilikan tanah sebagai alas hak atas tanahnya. *Kedua*, kegiatan di tingkat pemerintahan, yang melibatkan aparat pemerintah mulai dari desa/kelurahan, camat, kantor pertanahan, sampai dengan Kanwil BPN.

Kedua tingkatan kegiatan tersebut dapat dilihat secara rinci dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Barat Nomor DA-6980/III2F/1983, tanggal 26 Agustus 1983, perihal tertib prosedur penyelesaian permohonan penegasan hak atas tanah yang berasal dari tanah adat. Alur kegiatannya merujuk kepada Pasal 7 PMPA No. 6 Tahun 1962, yaitu termasuk hak-hak yang tidak mempunyai bukti sama sekali, sehingga mekanismenya harus melalui pengakuan hak dari Kanwil BPN.

Menurut SE Direktorat Agraria Sumatera Barat tersebut, bahwa dalam rangka menegakkan catur tertib pertanahan khususnya dalam bidang penyelesaian permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah adat, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Setiap penyelesaian permohonan penegasan hak atas tanah yang berasal dari tanah adat, harus melalui tata cara seperti yang dimaksud dalam PMDN No. 5 Tahun 1973 jo PMPA No. 2 Tahun 1962.
2. Bahan-bahan pembuktian pemilikan/penguasaan atas tanah itu berupa:
  - a. surat pernyataan pemilikan tanah dari yang bersangkutan yang dikuatkan oleh camat;
  - b. surat keterangan kepala desa/lurah yang dikuatkan oleh camat;
  - c. surat bukti-bukti lain seperti jual-beli, hibah yang ada sebelum PP No.10 Tahun 1961 dan sebagainya, semuanya dikuatkan oleh camat;
  - d. untuk tanah *kaum*, perlu dilampirkan *ranji* (silasila) *kaum* yang bersangkutan yang dibuat oleh *mamak kepala waris* (MKW), disahkan oleh penghulu *suku* yang bersangkutan dan oleh pejabat pemerintah setempat dan surat pernyataan pemilikan tanahnya harus mencantumkan nama-nama anggota *kaum* yang berhak yang sudah dewasa (17 tahun ke atas) pada waktu surat pernyataan itu dibuat.

Surat pernyataan pemilikan tanah dan surat-surat keterangan dari pejabat pemerintah tersebut, yang aslinya disimpan di kantor pertanahan setempat untuk disatukan dengan warkah tanahnya, sedangkan duplikatnya dikirim sebagai lampiran permohonan yang

bersangkutan.

Pihak-pihak yang harus ikut mengetahui, menyetujui dengan menandatangani surat pernyataan pemilikan tanah itu adalah: (1) yang bersangkutan; (2) para ahli waris; (3) *mamak kepal waris* (MKW)/kepala suku; (4) *sepadan* (pemilik tanah yang berbatasan); (5) diketahui pemerintah setempat, kepala desa/lurah dan camat; (6) *kerapatan adat nagari* (KAN) dan lain-lain sepanjang diperlukan.

3. Bahan-bahan bukti tersebutlah yang digunakan sebagai bahan untuk pemeriksaan oleh Panitia A.
4. Hasil pemeriksaan oleh Panitia A harus diumumkan dengan penggunaan tempat-tempat yang telah ditentukan melalui pejabat-pejabat seperti tersebut di bawah ini:
  - a. oleh camat setempat di papan pengumuman selama dua bulan;
  - b. oleh kepala desa/lurah setempat di papan pengumuman selama dua bulan;
  - c. oleh pengurus masjid tempat tanah terletak diumumkan selama 3 kali sidang *jum'at* berturut-turut.

Setelah tenggang waktu itu lewat, maka pejabat tersebut di atas menyampaikan hasil pengumuman disertai keterangan ada tidaknya pihak-pihak yang berkeberatan atas pengumuman tersebut kepada kantor pertanahan.

5. Setelah semua bahan-bahan untuk menyelesaikan permohonan itu lengkap dan tidak ada gugatan dari pihak lain, tenggang waktu sudah lampau maka berkas permohonan diteruskan oleh kantor pertanahan kepada Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat untuk diproses lebih lanjut.
6. Apabila menurut penilaian Kanwil BPN permohonan tersebut layak untuk dikabulkan, maka dikeluarkanlah surat keputusan (SK) penegasan haknya atas nama pemohon.

Kalau terjadi sengketa selama proses berlangsung maka penyelesaiannya harus melalui prosedur yang sangat panjang dan lama karena melibatkan banyak pihak. Proses konversinya terhenti sampai sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan.

## **B. Penyebab terjadinya Penyimpangan Konversi Hak atas Tanah Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik**

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa terjadinya penyimpangan konversi hak atas tanah *ganggam bauntuak* menjadi hak milik disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling terkait antara lain sebagai berikut.

### 1. Pemakaian istilah *ganggam bauntuak*

UUPA tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanah *ganggam bauntuak*, melainkan hanya menyatakan bahwa *ganggam bauntuak* adalah salah satu jenis hak adat atas tanah yang memberi kewenangan mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA yaitu hak pakai, karenanya harus dikonversi menjadi hak pakai.

Sepintas memang terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemegang *ganggam bauntuak* atas tanahnya memang mirip dengan hak pakai. Pemegang haknya hanya berhak memakai, mereka tidak mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum, seperti menjual. Walau demikian, tanah tersebut bukanlah berada di atas tanah negara tetapi merupakan bagian dari tanah milik *kaum*, jadi keberadaannya sama dengan tanah milik adat yang bercorak komunal tersebut. Oleh karena itulah dalam pelaksanaannya, tanah *ganggam bauntuak* dikonversi menjadi hak milik sebagai persil yang berasal dari hak milik adat. Konversi hak tanah *ganggam bauntuak* baru bisa menjadi hak pakai kalau tanah tersebut berada di atas tanah negara, sehingga pelaksanaannya dengan pemberian hak. Kalau ia berada di atas tanah milik adat (*kaum*) maka hak pakai itu hanya bisa lahir berdasarkan perjanjian dengan pemilik. Hal ini tidak mungkin terjadi karena pemegang *ganggam bauntuak* itu sendiri termasuk sebagai pemilik bidang tanah secara komunal bersama dengan anggota *kaum* yang lain. Hal yang mungkin terjadi adalah pemecahan atau pembagian tanah komunal itu berdasarkan kesepakatan, baik dibagi menurut perorangan maupun dibagi kepada kelompok-kelompok kecilnya yang disebut *paruik/jurai*.

Pengertian dan eksistensi tanah *ganggam bauntuak* seperti tersebut di atas merupakan hal yang paling utama menyebabkan penyimpangan konversinya. Faktor lainnya adalah konsekuensi logis dari hal itu.

### 2. Pengaruh lembaga *kerapatan adat nagari* (KAN)

Kerapatan adat nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan konversi dan pendaftaran tanah. Pihak Kanwil BPN dengan seluruh jajarannya sangat memperhatikan peran KAN dalam proses yang bertujuan untuk menciptakan salah satu dari catur tertib pertanahan ini.

Peran KAN yang sangat menonjol adalah dalam pembuatan surat pernyataan pemilikan tanah. Kalau terjadi pemecahan tanah milik adat menurut *ganggam bauntuak*, yang dilanjutkan dengan permohonan



konversinya, maka KAN bersama dengan *mamak kepala waris* (MKW) yang bersangkutan dan para penghulu *suku* akan membuat dan/atau menguatkan surat pernyataan pemilikan tanah atas nama pemegang *ganggam bauntuak* yang bersangkutan. Jadi pelaksanaan konversi hak *ganggam bauntuak* menjadi hak milik yang menyimpang dari ketentuan UUPA itu, tidak terlepas dari peran KAN yang mendukung kebijaksanaan tersebut sebagai lembaga masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya, karena memang menurutnya tanah *ganggam bauntuak* itu adalah tanah milik adat, bukan hak pakai.

### 3. Hak pakai dalam pengertian masyarakat

Jika masyarakat sudah berurusan dengan kantor pertanahan untuk mendapatkan kepastian hak atas tanahnya, sudah jelas bahwa mereka itu hanya tahu dengan sertipikat hak milik. Dapat dikatakan, tidak pernah terlintas dalam pikiran masyarakat bahwa pendaftaran tanah *ganggam bauntuak* itu hanya akan mendapatkan sertipikat hak pakai yang sangat asing bagi mereka.

Jika hanya untuk mendapatkan sertipikat hak pakai, untuk apa tanahnya harus dikonversi karena tanpa itu pun, mereka tetap mempunyai hak untuk memakai, mengolah, memungut hasil, dan bertempat tinggal sebagai pemiliknya. Dalam hal keamanan pemilikannya dari rongrongan pihak lain, tidak ada masalah karena kepemilikan mereka memang diakui oleh masyarakat dan di antara mereka sebetulnya sudah saling mengakui kepemilikan masing-masing. Jadi, kalau pelaksanaan konversi tanah *ganggam bauntuak* menjadi hak pakai, maka akan menghambat percepatan pelaksanaan konversi di Sumatera Barat, terutama dalam pendaftaran tanah secara sporadik karena bisa menghilangkan minat atau inisiatif masyarakat dalam mengajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanah milik adatnya itu.

### 4. Pemahaman masyarakat tentang konversi tanah *ganggam bauntuak* menjadi hak pakai

Masyarakat tidak memahami atau tidak menyadari bahwa menurut ketentuan konversi, hak *ganggam bauntuak* harus dikonversi menjadi hak pakai. Hal ini membuat masyarakat tidak pernah ragu-ragu atau takut mengajukan permohonan konversi tanah mereka karena mereka hanya paham bahwa kalau tanah milik adat itu dikonversi akan mendapatkan sertipikat hak milik, bukan hak pakai.

### C. Pendapat Masyarakat terhadap Pelaksanaan Konversi Hak atas Tanah *Ganggam Bauntuak*

#### 1. Jenis hak atas tanah hasil konversi

Seluruh responden tidak setuju dengan ketentuan Pasal VI Ketentuan Konversi UUPA yang menyatakan, bahwa tanah *ganggam bauntuak* dikonversi menjadi hak pakai. Mereka berpendapat bahwa tanah *ganggam bauntuak* itu harus dipahami dan dihargai sebagai tanah milik adat karena merupakan bagian tanah milik *kaum* sehingga apabila dikonversi harus menjadi hak milik, bukan hak pakai.

Permasalahannya adalah apakah hak milik hasil konversi itu tetap merupakan hak milik *kaum* atau hak milik masing-masing *paruik/jurai* pemegang *ganggam bauntuak* atau pun hak milik pribadi. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian karena dari sinilah biasanya awal terjadinya sengketa tanah adat dan di sini pula akan terlihat ada tidaknya pemecahan tanah milik *kaum* kepada masing-masing *ganggam bauntuak*. Kenyataannya, bahwa dibagi atau tidak dibaginya tanah milik *kaum* tersebut menurut *ganggam bauntuak* diserahkan sepenuhnya kepada *kaum*.

#### 2. Luas cakupan hak *ganggam bauntuak*

Pada umumnya responden tidak membedakan cakupan hak *ganggam bauntuak* antara tanah perumahan dengan tanah pertanian. Kedua jenis tanah menurut penggunaan itu, pada prinsipnya bisa dijadikan obyek *ganggam bauntuak*. Jika suatu *ganggam bauntuak* diajukan permohonan konversi, maka cakupan haknya meliputi, baik tanah perumahan maupun tanah pertanian.

Walaupun demikian, kecenderungannya menunjukkan bahwa terhadap tanah perumahan lebih mudah dikonversi menjadi hak milik dibandingkan dengan tanah pertanian karena di samping lebih mudah terbagi, juga pembagiannya lebih konkrit dibandingkan dengan tanah pertanian (sawah). Semuanya memang tergantung kepada kesepakatan *kaum*, kalau mereka sepakat, bukan tidak mungkin terhadap tanah pertanian pun hal tersebut bisa dilakukan.

#### 3. Kewajiban pemegang hak *ganggam bauntuak* dalam pelaksanaan konversi

Menurut narasumber fungsionaris adat, secara khusus terhadap *kaum* tidak ada kewajiban yang nyata. Pada prinsipnya masing-masing anggota *kaum* telah mendapat bagian yang sama sesuai dengan *ganggam bauntuak* yang mereka terima.

Pada tingkat adat, kewajiban tersebut pada umumnya hanya berupa pengeluaran biaya tertentu dalam rangka pembuatan surat pernyataan pemilikan tanah. Pembayaran itu diperuntukkan kepada para pihak yang berperan dan ikut menandatangani surat pernyataan pemilikan tanah yang bersangkutan.

Kewajiban lain seperti harus mengadakan upacara adat terlebih dahulu, sudah tidak dikenal lagi oleh masyarakat, minimal di lokasi penelitian. Jika ada, hanya dalam bentuk doa syukuran dan makan bersama sebagai wujud silaturahmi biasa. Hal yang penting untuk dicermati adalah, walaupun kewajibannya hanya berupa biaya tertentu, tetapi karena tidak adanya ketentuan yang jelas tentang batasannya maka, beban ini sering memberatkan masyarakat.

## KESIMPULAN

1. Mekanisme pelaksanaan konversi hak tanah ganggam bauntuak menjadi hak milik dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam PMPA No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak Indonesia atas Tanah. Sebagaimana halnya tanah milik kaum, tanah *ganggam bauntuak* termasuk kategori tanah yang tidak ada bukti hak sama sekali, oleh karena itu mekanisme konversinya menunjuk kepada Pasal 7 PMPA No. 2 Tahun 1962, yakni melalui pengakuan hak yang diberikan oleh Kanwil BPN.
2. Penyebab utama terjadinya penyimpangan pelaksanaan konversi tanah *ganggam bauntuak* menjadi hak milik adalah keberadaan dan isi hak atas tanah *ganggam bauntuak* itu sendiri yang memang merupakan tanah hak milik adat (komunal). Pemegang haknya termasuk sebagai pemilik tanah milik kaum tempat tanah *ganggam bauntuak* itu berada, jadi bukan hanya berstatus sebagai pemakai.
3. Menurut pendapat masyarakat, jenis hak yang sesuai sebagai konversi tanah *ganggam bauntuak* adalah hak milik, bukan hak pakai. Luas cakupan hak *ganggam bauntuak* meliputi, baik tanah pertanian maupun tanah perumahan, tetapi lebih cenderung menunjuk kepada tanah perumahan. Kewajiban pemegang hak dalam pelaksanaan konversi hanya berupa biaya-biaya tertentu dalam rangka pembuatan surat pernyataan pemilikan tanah dan sertifikatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 1990, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan Kedua, Jilid 10 dan 16, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta.

- Benda-Beckmann, Franns von, 1979, *Property in Social Continuity, Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau West Sumatra*, The Hague-Martinus Nijhoff, Leiden.
- Dt. Perpatih, Sjamsir, 1985, *Status Tanah Pusaka di Minangkabau setelah Disertipikatkan*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Firmansyah, 1989, *Pelaksanaan Konversi Tanah Ganggam Bauntuak dalam Masyarakat Minangkabau Menjadi Hak Pakai di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung*, Laporan Penelitian Fak. Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Harsono, Boedi, 1992, *Segi-segi Teoritis dan Implikasi Yuridis Pendaftaran Tanah*, Makalah pada Seminar Nasional Kegunaan Sertipikat dan Permasalahannya kerjasama BPN dan Fak. Hukum UGM, Tanggal 9 Juli, Yogyakarta.
- 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S. W., 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.